

REDEFINISI EFEKTIVITAS DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS PRINSIP-PRINSIP KEISLAMAN

Mulyono

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Email : mulyono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep efektivitas dalam manajemen pendidikan Islam yang selama ini cenderung dipahami secara teknokratis dan berorientasi pada capaian administratif. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu merepresentasikan tujuan substantif pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan kembali efektivitas berbasis prinsip-prinsip keislaman sebagai kerangka normatif yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan desain kajian pustaka. Data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi teori manajemen modern, konsep efektivitas organisasi, serta sumber-sumber pemikiran Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai pengelolaan seperti amanah, keadilan, ihsan, dan kemaslahatan. Analisis dilakukan secara kritis dan interpretatif untuk mengidentifikasi kelemahan konsep efektivitas konvensional sekaligus merumuskan alternatif konseptual yang lebih sesuai dengan karakter pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep efektivitas yang dominan saat ini mengalami reduksi makna karena terlalu menitikberatkan pada indikator kuantitatif. Sebagai alternatif, efektivitas dalam pendidikan Islam perlu dipahami sebagai keterpaduan antara capaian organisasi, kualitas proses, dan keselarasan nilai. Redefinisi ini menghasilkan model konseptual yang lebih integratif dan kontekstual. Dampak penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya wacana manajemen pendidikan Islam serta memberikan landasan konseptual bagi pengembangan praktik manajerial yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara normatif.

Kata Kunci : *Manajemen Pendidikan Islam, Efektivitas, Prinsip-Prinsip Keislaman, Pendekatan Normatif*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai efektivitas dalam manajemen pendidikan selama ini cenderung bergerak dalam kerangka yang relatif mapan, yakni menempatkan efektivitas sebagai ketercapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam literatur manajemen klasik hingga kontemporer, efektivitas sering diukur melalui indikator yang terukur, efisiensi biaya, kinerja institusional, dan capaian standar mutu (Samsu, 2025). Pendekatan ini, sebagaimana dikembangkan dalam tradisi manajemen modern, tidak sepenuhnya keliru, namun mengandung asumsi yang jarang dipersoalkan: bahwa tujuan organisasi dapat direduksi menjadi variabel-variabel yang dapat dihitung dan dibandingkan. Dalam konteks pendidikan, termasuk pendidikan Islam, asumsi ini kemudian diadopsi tanpa banyak resistensi epistemologis. Akibatnya, efektivitas menjadi konsep yang tampak netral, padahal ia membawa preferensi khususnya rasionalitas instrumental yang menekankan hasil terukur di atas makna substantif.

Ketika konsep tersebut masuk ke dalam praktik manajemen pendidikan Islam, terjadi proses adaptasi yang tidak selalu disertai refleksi kritis. Banyak lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk madrasah, sekolah Islam terpadu, maupun pesantren modern, mulai mengadopsi indikator efektivitas yang serupa dengan lembaga pendidikan umum: akreditasi,

capaian akademik, daya saing lulusan, dan efisiensi pengelolaan. Data dari berbagai laporan evaluasi pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan mutu sering diidentikkan dengan peningkatan skor standar nasional atau internasional (Ahmad, 2021). Namun di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan yang tidak selalu dijawab secara memadai: sejauh mana indikator-indikator tersebut mampu merepresentasikan tujuan pendidikan Islam yang lebih luas, seperti pembentukan karakter, internalisasi nilai, dan orientasi spiritual? Di titik ini, efektivitas mulai memperlihatkan keterbatasannya.

Kesenjangan antara capaian administratif dan tujuan substantif pendidikan Islam menjadi semakin nyata ketika lembaga dinilai “berhasil” secara formal, tetapi menghadapi problem pada dimensi etik dan kultural. Fenomena ini dapat diamati, misalnya, dalam meningkatnya orientasi kompetisi akademik yang tidak selalu diiringi dengan penguatan integritas moral peserta didik (Utami et al., 2026). Dengan kata lain, keberhasilan institusi sering kali diukur dari apa yang tampak, bukan dari apa yang terbentuk secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas, dalam pengertian yang dominan saat ini, cenderung mengalami reduksi makna ia berhenti pada level performa organisasi, tanpa menyentuh kualitas transformasi manusia yang menjadi inti pendidikan Islam itu sendiri.

Dari perspektif normatif, reduksi tersebut problematik. Pendidikan Islam tidak pernah dirancang semata sebagai sistem produksi output, melainkan sebagai proses pembentukan insan yang utuh, di mana dimensi intelektual, moral, dan spiritual saling berkelindan (Minarti, 2022). Ketika efektivitas hanya diukur melalui parameter teknis, maka dimensi nilai berisiko terpinggirkan atau sekadar dijadikan ornamen retorik. Di sinilah kritik normatif menemukan relevansinya: bukan untuk menolak seluruh kerangka manajemen modern, tetapi untuk menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak sepenuhnya kompatibel dengan tujuan pendidikan Islam jika tidak direkonstruksi secara konseptual. Kritik ini penting, karena tanpa itu, manajemen pendidikan Islam berpotensi kehilangan arah normatifnya sendiri.

Upaya untuk keluar dari problem tersebut memerlukan landasan yang lebih dari sekadar penyesuaian teknis. Prinsip-prinsip keislaman seperti amanah, keadilan (adl), ihsan, dan orientasi pada kemaslahatan tidak cukup dipahami sebagai nilai etis yang bersifat umum, tetapi perlu diposisikan sebagai kerangka operasional dalam menilai dan mengarahkan praktik manajemen (Mayasari et al., 2023). Dalam tradisi pemikiran Islam, nilai-nilai tersebut memiliki dimensi praksis mengatur relasi, menentukan prioritas, dan membentuk orientasi tindakan. Dengan demikian, integrasi prinsip keislaman ke dalam manajemen bukan sekadar proses “penambahan nilai”, melainkan upaya untuk membangun ulang fondasi konseptual efektivitas itu sendiri.

Dari sini, kebutuhan akan redefinisi efektivitas menjadi semakin jelas. Efektivitas dalam manajemen pendidikan Islam tidak lagi dapat dipahami semata sebagai ketercapaian target institusional, tetapi sebagai keterpaduan antara keberhasilan organisasi dan keselarasan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar eksistensinya. Redefinisi ini membuka kemungkinan munculnya dimensi baru dalam menilai efektivitas misalnya kebermaknaan proses pendidikan, kualitas relasi pedagogis, serta kontribusi lembaga terhadap pembentukan karakter dan orientasi hidup peserta didik (Nasution et al., 2025). Perbedaan mendasar dengan konsep konvensional terletak pada titik tekan: dari hasil yang terukur menuju makna yang dihayati, tanpa harus menafikan pentingnya pengelolaan yang profesional.

Dalam perkembangan kajian mutakhir, upaya untuk mereposisi efektivitas dalam pendidikan Islam mulai menunjukkan arah yang lebih reflektif, meskipun belum sepenuhnya terartikulasikan dalam kerangka yang sistematis. Sejumlah studi telah menyoroti pentingnya integrasi nilai dalam manajemen pendidikan, namun sering kali berhenti pada level normatif-deskriptif, belum sampai pada rekonstruksi konseptual yang operasional. Dengan demikian,

state of the art dalam bidang ini masih menyisakan ruang yang terbuka: kebutuhan untuk merumuskan model efektivitas yang tidak hanya berakar pada prinsip keislaman, tetapi juga mampu berdialog dengan tuntutan manajemen modern. Di titik inilah penelitian normatif memiliki posisi strategis, karena ia memungkinkan eksplorasi konseptual yang lebih mendalam tanpa terikat pada keterbatasan empiris semata.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai redefinisi efektivitas dalam manajemen pendidikan Islam tidak sekadar bersifat akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis yang tidak dapat diabaikan. Tanpa upaya untuk menata ulang cara kita memahami efektivitas, lembaga pendidikan Islam berisiko terjebak dalam paradoks: berhasil secara struktural, tetapi kehilangan orientasi nilai yang seharusnya menjadi ruhnya. Penelitian ini berangkat dari kesadaran tersebut bahwa diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menjembatani antara tuntutan profesionalisme dan komitmen terhadap prinsip keislaman. Bukan untuk meniadakan salah satunya, melainkan untuk memastikan bahwa keduanya dapat saling menguatkan dalam praktik manajemen pendidikan yang lebih bermakna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan orientasi konseptual-kritis untuk menelaah kembali konstruksi efektivitas dalam manajemen pendidikan Islam. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian tidak berhenti pada fenomena empiris, melainkan berfokus pada bagaimana suatu konsep seharusnya dirumuskan berdasarkan kerangka nilai tertentu. Dalam tradisi penelitian hukum dan filsafat manajemen, pendekatan semacam ini lazim digunakan untuk menguji koherensi antara praktik dan prinsip (Lumbu et al., 2026). Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi literatur manajemen pendidikan, teori efektivitas organisasi, serta khazanah pemikiran Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip pengelolaan, seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Literatur tersebut tidak diposisikan sebagai kumpulan rujukan pasif, tetapi sebagai medan dialog konseptual yang memungkinkan penulis mengidentifikasi asumsi, bias, serta batasan dari konsep efektivitas yang dominan digunakan saat ini.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan interpretatif dan argumentatif. Pertama, penulis melakukan pembacaan kritis terhadap konsep efektivitas dalam literatur manajemen modern untuk mengungkap struktur epistemologis dan kecenderungan nilai yang melatarbelakanginya. Kedua, dilakukan komparasi konseptual dengan prinsip-prinsip keislaman yang memiliki relevansi terhadap tata kelola pendidikan, guna menemukan titik temu maupun ketegangan di antara keduanya. Ketiga, berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyusun rekonstruksi konseptual mengenai efektivitas yang lebih selaras dengan karakter pendidikan Islam (Nurhaidah, 2026). Validitas kajian tidak diukur melalui generalisasi statistik, melainkan melalui kekuatan argumentasi, konsistensi logika, serta ketepatan dalam mengaitkan konsep dengan kerangka nilai yang digunakan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bertujuan menghasilkan deskripsi, tetapi menawarkan formulasi konseptual yang dapat menjadi dasar refleksi dan pengembangan praktik manajemen pendidikan Islam ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematisasi Konsep Efektivitas dalam Manajemen Pendidikan

Dalam literatur manajemen, efektivitas umumnya didefinisikan sebagai tingkat ketercapaian tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi ini tampak sederhana, tetapi di baliknya tersimpan asumsi epistemologis yang kuat: bahwa tujuan organisasi bersifat jelas, stabil, dan dapat diukur secara objektif. Dalam tradisi manajemen modern seperti yang berkembang dari pemikiran Drucker hingga pendekatan *performance*

management kontemporer, efektivitas cenderung dikaitkan dengan indikator kuantitatif seperti produktivitas, efisiensi, dan output yang terstandar (AL FARABI, n.d.). Pendekatan ini diperkuat oleh logika *new public management* yang menekankan akuntabilitas berbasis hasil, bahkan dalam sektor publik seperti pendidikan (Lazuardi & Wahidahwati, 2022). Di titik ini, efektivitas tidak lagi sekadar konsep teknis, tetapi menjadi mekanisme evaluatif yang membentuk cara organisasi memahami keberhasilan.

Namun demikian, karakter teknokratis dari konsep efektivitas sering kali tidak disadari. Ia bekerja secara diam-diam dengan mengedepankan rasionalitas instrumental yakni kecenderungan untuk menilai segala sesuatu berdasarkan kegunaan dan keterukurannya. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini memunculkan dominasi indikator seperti nilai ujian, tingkat kelulusan, dan capaian akreditasi sebagai representasi utama keberhasilan institusi. Studi OECD (2019), misalnya, menunjukkan bagaimana sistem pendidikan global semakin terstandarisasi melalui pengukuran berbasis kinerja (Ma'mun & Rochaendi, n.d.). Meskipun memberikan manfaat dalam hal komparabilitas dan akuntabilitas, pendekatan ini juga berpotensi mereduksi kompleksitas tujuan pendidikan yang seharusnya tidak sepenuhnya dapat dikalkulasi.

Ketika konsep ini diadopsi dalam pendidikan Islam, prosesnya sering berlangsung tanpa proses refleksi epistemologis yang memadai. Lembaga pendidikan Islam di berbagai negara berkembang seperti Indonesia, Pakistan, dan Nigeria mulai mengintegrasikan indikator efektivitas yang serupa dengan sistem pendidikan umum, terutama dalam upaya meningkatkan daya saing dan legitimasi publik (Rosyada et al., 2025). Namun, adopsi ini tidak selalu diiringi dengan upaya untuk menyesuaikan konsep tersebut dengan tujuan normatif pendidikan Islam. Akibatnya, efektivitas menjadi konsep yang tampak netral, tetapi sebenarnya membawa preferensi nilai tertentu yang tidak selalu selaras dengan orientasi pendidikan Islam itu sendiri.

Praktik Efektivitas dalam Manajemen Pendidikan Islam

Dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam sering mendefinisikan keberhasilan melalui kombinasi antara capaian akademik dan legitimasi institusional. Indikator seperti akreditasi, jumlah peserta didik, kelulusan, serta keberhasilan alumni dalam memasuki pasar kerja menjadi ukuran yang dominan. Di Indonesia, misalnya, banyak madrasah dan sekolah Islam yang menjadikan peringkat akreditasi sebagai indikator utama keberhasilan lembaga. Hal serupa juga terlihat di Pakistan, di mana sekolah berbasis Islam mulai mengadopsi kurikulum nasional dan sistem evaluasi standar untuk meningkatkan kredibilitasnya di mata publik (Kristiana et al., 2025). Dalam konteks ini, efektivitas cenderung dipahami sebagai kemampuan lembaga untuk memenuhi tuntutan eksternal.

Namun di balik itu, terdapat dimensi lain yang tidak selalu terukur secara formal. Banyak pesantren tradisional, misalnya, tetap mempertahankan indikator keberhasilan yang lebih bersifat kultural dan spiritual, seperti kedalaman pemahaman agama, adab santri, dan relasi antara guru dan murid. Ketika dua sistem penilaian ini bertemu yang satu berbasis administratif, yang lain berbasis nilai muncul ketegangan yang tidak selalu terselesaikan. Lembaga sering kali harus bernegosiasi antara mempertahankan identitas nilai dan memenuhi tuntutan standar formal yang ditetapkan oleh negara atau pasar pendidikan.

Kasus di beberapa negara Afrika, seperti Nigeria, menunjukkan dinamika yang serupa. Sekolah Islam di wilayah tersebut menghadapi tekanan untuk meningkatkan performa akademik agar tidak tertinggal dari sekolah umum, namun di sisi lain tetap diharapkan menjaga fungsi keagamaan dan sosialnya. Studi dari World Bank (2020) mencatat bahwa banyak lembaga pendidikan berbasis agama mengalami dilema dalam menentukan prioritas antara capaian akademik dan pembentukan karakter (Cahyadi et al., 2025). Ketegangan ini menunjukkan bahwa praktik efektivitas dalam pendidikan Islam tidak pernah sepenuhnya

stabil; ia selalu berada dalam proses negosiasi antara berbagai tuntutan yang tidak selalu sejalan.

Kritik Normatif terhadap Reduksi Makna Efektivitas

Dari perspektif normatif, pendekatan efektivitas yang dominan saat ini dapat dianggap tidak memadai karena cenderung mengabaikan dimensi nilai yang menjadi inti pendidikan Islam. Efektivitas yang direduksi menjadi sekadar ketercapaian target administratif berisiko menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan manusia menjadi produksi output. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak seluruh kerangka manajemen modern, tetapi untuk menunjukkan bahwa kerangka tersebut memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada konteks yang sarat nilai seperti pendidikan Islam. Dalam hal ini, efektivitas tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi persoalan filosofis tentang apa yang dianggap sebagai “keberhasilan”.

Kegagalan utama pendekatan ini terletak pada ketidakmampuannya menangkap dimensi internal dari proses pendidikan. Nilai-nilai seperti keikhlasan, integritas, dan kesadaran moral tidak mudah diukur melalui indikator kuantitatif, namun justru menjadi inti dari tujuan pendidikan Islam. Ketika dimensi ini diabaikan, maka efektivitas menjadi konsep yang parsial hanya melihat apa yang dapat diukur, bukan apa yang seharusnya dicapai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengarah pada distorsi tujuan pendidikan, di mana institusi lebih fokus pada pencapaian indikator daripada pembentukan makna.

Konsekuensinya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis. Lembaga pendidikan dapat mengalami apa yang disebut sebagai *goal displacement*, yakni pergeseran tujuan dari yang substantif ke yang administratif (Ismail, 2025). Dalam konteks negara berkembang, fenomena ini sering terlihat dalam praktik “teaching to the test” atau orientasi berlebihan pada ujian. Akibatnya, proses pendidikan menjadi sempit dan kehilangan kedalaman. Kritik normatif di sini menjadi penting sebagai upaya untuk mengembalikan orientasi pendidikan pada tujuan yang lebih esensial, sekaligus membuka ruang bagi redefinisi konsep efektivitas yang lebih komprehensif.

Prinsip-Prinsip Keislaman sebagai Basis Redefinisi

Untuk merumuskan ulang efektivitas, diperlukan fondasi normatif yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional. Prinsip-prinsip keislaman seperti amanah, keadilan, ihsan, dan kemaslahatan menawarkan kerangka yang potensial, karena masing-masing mengandung implikasi praktis dalam pengelolaan organisasi. Amanah, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab moral, tetapi juga dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga. Demikian pula keadilan, yang menuntut distribusi sumber daya dan kesempatan yang proporsional dalam lingkungan pendidikan.

Namun tantangan utamanya terletak pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam praktik manajerial. Tanpa elaborasi yang memadai, nilai-nilai tersebut berisiko menjadi slogan normatif yang tidak memiliki daya transformasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan aspek konkret manajemen, seperti pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan pembentukan budaya organisasi. Dalam konteks ini, prinsip keislaman tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif yang menentukan arah tindakan.

Relasi antara nilai dan praktik menjadi kunci dalam proses ini. Nilai tidak berdiri di luar praktik, melainkan membentuk dan dibentuk oleh praktik itu sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti bahwa manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi juga sebagai ruang di mana nilai-nilai tersebut diaktualisasikan. Dengan demikian, integrasi prinsip keislaman ke dalam manajemen bukan sekadar

penambahan dimensi moral, tetapi merupakan proses rekonstruksi yang menyentuh inti dari cara organisasi beroperasi.

Rekonstruksi Konsep Efektivitas dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan kritik dan landasan normatif yang telah dibangun, efektivitas dalam manajemen pendidikan Islam perlu didefinisikan ulang sebagai keterpaduan antara capaian organisasi dan keselarasan dengan nilai-nilai keislaman. Definisi ini menggeser fokus dari sekadar hasil menuju proses dan makna. Efektivitas tidak lagi diukur hanya dari apa yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana pencapaian tersebut diperoleh dan sejauh mana ia mencerminkan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga.

Dari sini muncul kemungkinan dimensi-dimensi baru dalam memahami efektivitas. Selain dimensi teknis, seperti efisiensi dan produktivitas, terdapat dimensi etik dan spiritual yang tidak kalah penting. Dimensi etik berkaitan dengan keadilan, integritas, dan tanggung jawab, sementara dimensi spiritual berkaitan dengan orientasi tujuan yang melampaui kepentingan duniawi semata. Kombinasi dari dimensi-dimensi ini menghasilkan konsep efektivitas yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Perbedaan mendasar dengan konsep konvensional terletak pada titik tekan. Jika pendekatan konvensional menekankan hasil yang terukur, maka pendekatan ini menekankan keselarasan antara hasil dan nilai. Dalam praktiknya, hal ini dapat diterjemahkan dalam bentuk model konseptual yang mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta mengakui keterbatasan masing-masing. Model semacam ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan yang ada, tetapi untuk melengkapinya dengan dimensi yang selama ini terabaikan.

Implikasi terhadap Praktik Manajemen Pendidikan Islam

Redefinisi efektivitas membawa implikasi langsung terhadap praktik kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Pemimpin tidak lagi sekadar berperan sebagai manajer yang memastikan tercapainya target, tetapi juga sebagai penjaga nilai yang memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan prinsip keislaman. Hal ini menuntut kompetensi yang tidak hanya teknis, tetapi juga reflektif dan etik. Dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi ruang di mana nilai dan praktik bertemu secara konkret.

Implikasi juga terlihat dalam sistem evaluasi. Jika efektivitas didefinisikan secara lebih luas, maka indikator evaluasi pun harus diperluas. Evaluasi tidak hanya mencakup capaian akademik, tetapi juga kualitas proses pembelajaran, relasi antar aktor pendidikan, serta dampak jangka panjang terhadap karakter peserta didik. Beberapa lembaga pendidikan Islam di Malaysia dan Indonesia mulai mengembangkan instrumen evaluasi berbasis nilai, meskipun masih dalam tahap awal dan belum terstandarisasi secara luas.

Pada level budaya organisasi, redefinisi ini mendorong terciptanya lingkungan yang lebih reflektif dan berorientasi nilai. Budaya organisasi tidak lagi didominasi oleh logika kompetisi dan capaian, tetapi juga oleh komitmen terhadap integritas dan kebermaknaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi cara lembaga merumuskan tujuan pendidikan tidak hanya sebagai target yang harus dicapai, tetapi sebagai arah yang memberi makna pada seluruh proses pendidikan.

Refleksi Kritis

Meskipun menawarkan kerangka yang lebih komprehensif, redefinisi efektivitas ini tidak lepas dari pertanyaan tentang realitas implementasinya. Dalam konteks lembaga pendidikan di negara berkembang, keterbatasan sumber daya dan tekanan eksternal sering kali membuat pendekatan normatif sulit diterapkan secara utuh. Lembaga tetap harus memenuhi

standar yang ditetapkan oleh negara atau pasar, yang umumnya berbasis indikator kuantitatif. Dalam situasi seperti ini, redefinisi efektivitas berpotensi dianggap idealistik.

Selain itu, resistensi juga dapat muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Perubahan cara memahami efektivitas berarti perubahan dalam cara kerja, sistem evaluasi, dan bahkan budaya organisasi. Tidak semua aktor siap untuk perubahan semacam ini, terutama jika mereka telah terbiasa dengan sistem yang ada. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai keislaman justru dipahami secara sempit dan tidak dikembangkan menjadi kerangka operasional yang memadai, sehingga sulit dijadikan dasar untuk redefinisi yang lebih luas.

Di sisi lain, pendekatan normatif memiliki keterbatasan inheren, terutama dalam hal verifikasi empiris. Ia kuat dalam argumentasi, tetapi sering dipertanyakan dalam hal implementasi. Oleh karena itu, redefinisi efektivitas yang diusulkan dalam kajian ini perlu dilihat sebagai langkah awal sebuah upaya untuk membuka ruang refleksi dan dialog, bukan sebagai formulasi final yang siap diterapkan tanpa penyesuaian. Justru dalam keterbatasan inilah, ruang pengembangan ke depan menjadi semakin terbuka.

KESIMPULAN

Jika ditarik secara hati-hati dari keseluruhan pembahasan, terlihat bahwa konsep efektivitas dalam manajemen pendidikan Islam selama ini tidak berdiri dalam ruang yang netral. Ia dibentuk oleh logika manajemen modern yang cenderung menekankan rasionalitas instrumental, efisiensi, dan ukuran-ukuran yang dapat dihitung. Ketika kerangka ini diadopsi ke dalam pendidikan Islam, ia memang memberikan keuntungan dalam hal akuntabilitas dan standardisasi, tetapi sekaligus menyisakan persoalan mendasar: reduksi makna pendidikan itu sendiri. Efektivitas menjadi identik dengan performa administratif, sementara dimensi nilai yang justru menjadi inti pendidikan Islam sering kali berada di pinggiran.

Pada level praktik, ketegangan tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan nyata dalam dinamika kelembagaan, khususnya di negara-negara berkembang. Lembaga pendidikan Islam berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya otonom; ia harus bernegosiasi dengan tuntutan negara, pasar, dan masyarakat. Akibatnya, indikator keberhasilan yang digunakan cenderung mengikuti standar eksternal, meskipun tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif yang diusung. Di sinilah tampak adanya kesenjangan antara capaian yang terukur dan kebermaknaan yang diharapkan. Lembaga dapat dinilai efektif secara formal, tetapi belum tentu berhasil dalam membentuk kualitas manusia sebagaimana yang diidealkan dalam pendidikan Islam.

Berangkat dari problem tersebut, kajian ini menunjukkan bahwa redefinisi efektivitas bukan sekadar pilihan konseptual, melainkan kebutuhan epistemologis. Prinsip-prinsip keislaman seperti amanah, keadilan, ihsan, dan orientasi kemaslahatan memberikan landasan untuk merumuskan ulang efektivitas secara lebih utuh. Dalam kerangka ini, efektivitas tidak lagi dipahami semata sebagai ketercapaian tujuan organisasi, tetapi sebagai keselarasan antara hasil, proses, dan nilai. Pergeseran ini membuka ruang bagi munculnya dimensi evaluasi yang lebih luas, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana dan untuk apa pencapaian tersebut dilakukan.

Namun demikian, redefinisi ini tidak dapat dipahami sebagai solusi yang selesai dengan sendirinya. Ia justru membuka ruang pertanyaan baru tentang bagaimana menerjemahkan nilai ke dalam praktik, bagaimana menghadapi resistensi struktural, dan sejauh mana pendekatan normatif dapat berinteraksi dengan tuntutan empiris yang ada. Oleh karena itu, kontribusi utama kajian ini terletak pada upayanya menggeser cara pandang: dari menerima konsep efektivitas sebagai sesuatu yang *given* menuju melihatnya sebagai konstruksi yang dapat dan perlu dipertanyakan serta dirumuskan kembali. Di titik inilah, manajemen pendidikan Islam

menemukan peluang untuk tidak sekadar beradaptasi, tetapi juga menawarkan arah yang lebih bermakna.

DAFTAR ISI

- Ahmad, M. (2021). Manajemen mutu pendidikan. *Penerbit Qiara Media*.
- AL FARABI, M. Y. (n.d.). *MANAJEMEN KONTEMPORER DI DALAM DINAMIKA LINGKUNGAN SISTEMIK*.
- Cahyadi, F., Purnamasari, V., & Azizah, F. N. (2025). *Kemanusiaan di Persimpangan Zaman: Spiritualitas, Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi*. Cahya Ghani Recovery.
- Ismail, Y. (2025). Bridging the Gap: Policy Strategies to Align UIN Salatiga Research with Regional Needs. *AMUYA: INDONESIAN JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS*, 1(2), 243–268.
- Kristiana, K., Juliani, J., Azizah, J. F., Nur, M. H., & Rahmawati, P. (2025). Kebijakan Akreditasi Madrasah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 1242–1249.
- Lazuardi, A. H., & Wahidahwati, W. (2022). Paradigma New Public Management (NPM) sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Good Governance di Indonesia. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 209–218.
- Lumbu, A., Panda, F. M., Judijanto, L., Djollong, A. F., Tumober, R. T., Priyanto, P., Marliana, T., Basir, M. K., Utami, R. N., & Ardiansyah, W. (2026). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ma'mun, S., & Rochaendi, E. (n.d.). *MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN*.
- Mayasari, R. P., Terzaghi, M. T., & Rabi'i, M. I. S. (2023). Prinsip-Prinsip Tata Kelola Berakhlak Lembaga Filantropi Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 5(1), 85–94.
- Minarti, S. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*. Amzah.
- Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R., Devianty, T., Nampira, R. A., Lumbanraja, V., & Vidiastuti, D. P. (2025). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas*. Star Digital Publishing.
- Nurhaidah, S. N. (2026). *Metodologi Penelitian Studi Islam*. PT. Afanin Media Utama.
- Rosyada, D., Zalnur, M., & Sartini, T. (2025). Reformasi Pendidikan Islam Di Pakistan: Ketegangan Antara Konservatisme Agama Dan Tuntutan Global. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 861–877.
- Samsu, S. A. (2025). *Analisis kebijakan dalam manajemen pendidikan Islam*. Zabags Qu Publish.
- Utami, Y. S., Febrianto, R., Sari, N., Nugraha, H., Saputra, H., & Yumarni, A. (2026). Birokrasi dan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 9(1), 24–35.